

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Soppeng

Khaerul Mubarak

Program Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin

Email: khaerulmubarak99@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how the role of the Tourism, Youth and Sports Office of Soppeng Regency in the development of Tourism Villages and the factors that influence it. To achieve this goal, qualitative research methods are used using descriptive data. Data collection techniques are observation, interviews, as well as documents and archives using qualitative descriptive analysis techniques.

The results showed that the Role of Local Government in Tourism Development in Soppeng Regency from where the Regional Regulation of Soppeng Regency Number 2 of 2019 concerning Tourism Villages from the aspect of tourism village development consists of Tourism Village Institutions, Tourism Village Objects, Tourism Village Marketing, has been running well. From the aspect of Tourism Village Institutions in Mattabulu and Bule villages, Village-Owned Enterprises (BUMDES) and Pokdarwis institutions have been formed that manage tourism villages, while the tourist village objects of each village have their own charms both natural attractions and cultural tourism objects, while the marketing of tourism villages is carried out by all stakeholders, both district governments who carry out promotions in the form of advertisements and direct promotions in the form of introduction of tourist objects in Soppeng Regency and the village government promote through official website accounts and social media such as Instagram, Facebook, and Twitter of each village.

Keywords: *Role, Tourism Village Development, Soppeng Regency.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng dalam pengembangan Desa Wisata dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakanlah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Soppeng dari sebagai mana peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Desa Wisata dari aspek pembangunan desa wisata terdiri dari Kelembagaan Desa Wisata, Objek Desa Wisata, Pemasaran Desa Wisata, telah berjalan dengan baik. Dari aspek Kelembagaan Desa Wisata di desa mattabulu dan bulue sudah terbentuk lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Pokdarwis yang mengelola desa wisata, sementara objek desa wisata masing-masing desa memiliki daya tarik tersendiri baik objek wisata alam maupun objek wisata budaya, sedangkan pemasaran desa wisata dilakukan oleh seluruh stakeholder baik pemerintah kabupaten yang melakukan promosi dalam bentuk iklan maupun promosi langsung dalam bentuk pengenalan objek wisata yang ada di Kabupaten Soppeng serta pemerintah desa melakukan promosi melalui akun Website resmi maupun media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter masing-masing desa.

Kata kunci: *Peran, Pengembangan Desa Wisata, Kabupaten Soppeng.*

PENDAHULUAN

Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan wisata melimpah mampu mengatasi masalah-masalah mendasar dengan penguatan ekonomi dari penerimaan devisa/pendapatan daerahnya, dengan itulah Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman melimpah dapat mengembangkan potensinya, misalnya dari segi pariwisata sebab wisatawan yang berkunjung ke Indonesia mencari atau menikmati keindahan wisata Indonesia sehingga memberikan efek domino bagi dalam maupun luar negeri, bila dari luar negeri negara kita semakin terkenal maka bagi dalam negeri negara kita dapat menambah devisa guna mengangkat kesejahteraan masyarakat yang ada saat ini. Tidak heran bahwa hal ini bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara yang berpotensi tinggi dalam hal perairan utamanya menyangkut dengan potensi wisatanya.

Pariwisata merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan suatu wilayah. Dari hasil pariwisata di Indonesia dapat menjadi salah satu sumber pendapatan pajak Negara Indonesia. Pariwisata suatu wilayah dapat menjadi ciri khas atau karakter suatu wilayah yang membuatnya berbeda dengan daerah lainnya.

Umumnya pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan seseorang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan meninggalkan tempat semula dalam sementara waktu tetapi hanya untuk berekreasi dan bukan untuk mencari nafkah atau berbisnis. Menurut Anuar et al. (2011:148) orang yang meninggalkan rumahnya untuk berekreasi ke suatu tempat serta mengeluarkan uang adalah wisatawan. Strategi untuk meningkatkan perekonomian daerah yaitu dengan mempromosikan potensi pariwisata pada suatu daerah. Binns et al. (2002:237) menyatakan pemerintah perlu terfokus untuk mempromosikan pariwisata, karena sektor pariwisata berpotensi sebagai

pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata adalah sektor terintegrasi meliputi keindahan pemandangan, tempat arkeologi dan sejarah, budaya, social politik serta pembangunan infrastruktur.

Menurut Dwyer and Spurr (2009:15) pariwisata adalah kekuatan global untuk pembangunan ekonomi dan regional, pengembangan pariwisata membawa serta campuran manfaat dan biaya dalam bidang pertumbuhan ekonomi pariwisata. Pariwisata juga merupakan salah satu industri terbesar di dunia dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah tujuan wisata. Pertumbuhan ekonomi biasanya sebagai tolak ukur pembangunan ekonomi di suatu negara (Kesuma, 2015:102). Pariwisata juga merupakan salah satu industri paling cepat dalam menyediakan peluang kerja, perolehan, serta akan mampu menghidupkan sektor produksi lain di suatu daerah pariwisata (Waskito, 2013:16).

Dampak positif dari pariwisata terhadap pembangunan ekonomi yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan bagi negara serta distribusi pembangunan. Efek negatif dari pariwisata akan pembangunan ekonomi yaitu kebocoran pendapatan serta pekerjaan yang bersifat musiman. Menurut Lie (2004:3), berkembangnya industri pariwisata di suatu daerah hanya bergantung terhadap jumlah wisatawan yang berkunjung. Kunjungan wisatawan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan dari industri pariwisata yang dapat memberikan dampak positif terhadap pemerintah daerah serta masyarakat. Disamping itu perkembangan pariwisata juga akan memberi efek tidak langsung kepada masyarakat. Menurut Samimi (2011:29), pada negara berkembang, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor ekspor yang sangat signifikan.

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan

kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam upaya mewujudkan pembangunan pariwisata yang baik, maka pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam hal perencanaan, pembangunan dan pengembangan potensi wisata yang ada didaerahnya masing-masing.

Meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata, menjadikan sektor pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan baik negara maupun daerah, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur. Hal ini mendorong beberapa daerah mulai melirik untuk mengembangkan kawasan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan untuk peningkatan ekonomi daerah.

Demi mencapai sebuah keberhasilan dalam pengembangan wisata perlu dilakukan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta usaha kepariwisataan yang kecil, menengah, dan besar agar saling menunjang.

Pengembangan kepariwisataan nasional mengacu pada landasan idiil (Nilai-nilai Agama dan Pancasila) dan landasan konstitusional (UUD 1945 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009) yang secara operasional dilaksanakan oleh para pelaku utama pengembangan kepariwisataan. Para pelaku utama tersebut menggerakkan kegiatan pariwisata yang bertumpu pada pergerakan aspek-aspek ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang secara dinamis mendukung kepariwisataan nasional.

Dalam mendorong pembangunan kepariwisataan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025

dan menetapkan peta perwilayahan pembangunan 222 (dua ratus dua puluh dua) kawasan pengembangan pariwisata nasional (KPPN) pada 50 (lima puluh) Destinasi Pariwisata Nasional dan 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Pembangunan kepariwisataan yang diatur dalam undang-undang tentang kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan berdasarkan rencana induk kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diharapkan menekankan asas berkelanjutan yang berbasis lingkungan untuk meminimalisir dampak negatif perkembangan industri pariwisata khususnya terhadap lingkungan.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah tujuan wisata, ini dilihat dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke Sulawesi Selatan, maka perkembangan di bidang pariwisata pun mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dari pesatnya pembangunan prasarana dan sarana wisata seperti pembangunan hotel, bertambahnya travel agen, dijadikannya Bandar Udara Sultan Hasanuddin sebagai bandar udara internasional dan makin dikembangkannya tempat-tempat wisata lainnya. Dalam upaya untuk melaksanakan program pembangunan pariwisata yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah Sulawesi Selatan berusaha meningkatkan citra positif dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya atau potensi pariwisata yang dimilikinya. Selain upaya pembangunan obyek dan daya tarik wisata dan kegiatan promosi, diperlukan pula fasilitas pelayanan wisatawan diantaranya sarana transportasi, akomodasi yang nyaman, keamanan serta hal lain yang

dianggap perlu untuk menunjang program pengembangan pariwisata.

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Soppeng memiliki 8 kecamatan, 21 kelurahan dan 49 desa. Kabupaten Soppeng tidak memiliki daerah pesisir, dan sekitar 77% desa dan kelurahannya bertopografi dataran, yang berarti kebanyakan mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Soppeng itu petani, pedagang, dan pegawai swasta. Kabupaten Soppeng ini mendapat julukan Kota Kalong karena ditempat ini banyak terdapat kelelawar di setiap pohon yang ada di sepanjang kota ini, menurut mitos apabila pendatang dari luar Kabupaten Soppeng yang terkena kotoran kelelawar, maka jodohnya adalah orang Soppeng.

Kabupaten Soppeng adalah sebuah daerah yang mempunyai destinasi wisata yang cukup banyak dan beragam. Objek wisata di Kabupaten Soppeng tersebar di seluruh wilayah, baik itu wisata budaya maupun wisata alam yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun manca negara. Salah satu objek wisata di Kabupaten Soppeng yang memiliki prospek cukup potensial untuk dikelola dan dikembangkan adalah Desa Wisata Bulue Kecamatan Marioriawa, adapun yang menjadi objek wisatanya yaitu Pemandian Air Panas Lejja. Begitu juga Desa Wisata Citta Kecamatan Citta yang memiliki objek wisata Permandian Alam Citta. Kedua Desa ini merupakan aset wisata alam di Kabupaten Soppeng yang mempunyai daya tarik tinggi dengan suasana dan pemandangannya yang masih asri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata berkelanjutan yang menjelaskan bahwa Desa Wisata termasuk destinasi wisata dalam skala kecil. Desa Wisata ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan

manca negara di Kabupaten Soppeng setiap tahunnya.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Soppeng mengacu pada pembangunan kepariwisataan nasional yang tetap menjunjung ciri khas bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Soppeng merujuk pada norma-norma agama dan nilai-nilai budaya dalam setiap segi kehidupan masyarakat. Falsafah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Soppeng menyangkut hubungan kehidupan yang berkeimbangan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam. Segala bentuk kegiatan kepariwisataan sejalan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Soppeng juga tidak mengenal perbedaan ras, suku, bangsa, agama, jenis kelamin, bahasa, seperti pengakuan atas prinsip dasar hak asasi manusia (HAM). Pemanfaatan lingkungan bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Soppeng menerapkan keseimbangan mikro (manusia) dan makro (alam) untuk mencegah ketidakadilan, keserakahan, dan pengrusakan terhadap budaya dan alam Kabupaten Soppeng.

Orientasi pengembangan desa wisata seyogyanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya ini diperlukan kesabaran dalam melakukan pengkajian, perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan secara wajar dan adil, baik terhadap alam maupun manusianya. Tidak hanya manusia yang memiliki hak, juga alam lingkungan memiliki hak yang harus dan wajib ditunaikan oleh manusia yang memanfaatkannya. Optimalisasi daya dukung memerlukan pemahaman yang baik mengenai karakter, dinamika dan kecenderungan yang

berkembang. Ini perlu dicermati dan diikuti, sehingga perkembangan itu mengarah pada kelestarian, bukan kerusakan.

Desa Bulue yang terletak di Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebelah Barat Gunung Pangesore dan berjarak sekitar 49 km sebelah utara Kota Watansoppeng atau sekitar 14 km dari ibu kota Kecamatan Marioriawa. Desa Bulue merupakan Desa Wisata yang ada di Kabupaten Soppeng, dengan produk wisata andalannya yaitu Permandian air panas Lejja. Satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan desa wisata adalah persoalan kapasitas kelembagaan pengelola desa wisata. Pengembangan desa wisata di Kabupaten Soppeng selama ini terkesan masih belum memiliki pendekatan yang kuat. Pendekatan hal ini yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan (pemerintah daerah dan masyarakat) yang memiliki spektrum konsep dan pendekatan yang bervariasi.

Permandian Air Panas Lejja menyediakan fasilitas berupa kolam renang yang terbagi atas 2 bagian yaitu kolam renang umum dan kolam renang private, air bersih, listrik, toilet, ruang ganti pakaian, pondok peristirahatan seperti gazebo, villa serta baruga wisata sebagai tempat pertemuan dengan daya tampung 300 orang, areal parkir, jalan beraspal dan lain-lain. Adanya fasilitas tersebut membuktikan bahwa Permandian Air Panas Lejja sudah tidak dapat diragukan lagi. Tapi jika dilihat dari segi perawatan fasilitas, bisa dikatakan pihak pengelola belum berhasil terbukti dengan adanya sebagian fasilitas yang mengalami kerusakan tapi tidak dilakukan perbaikan. Adapun sarana yang dimaksud penulis dalam hal ini seperti toilet, ruang ganti pakaian, papan seluncuran dan sebagainya. Rusaknya sarana dan prasarana pendukung di suatu objek wisata membuat wisatawan yang datang berkunjung merasa tidak nyaman dan itu bisa berdampak terhadap menurunnya jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke objek wisata Permandian Air Panas Lejja.

Kondisi seperti ini memang ironis mengingat potensi yang dimiliki objek wisata Permandian Air Panas Lejja sangat menjanjikan, tapi belum dikelola secara optimal dan profesional. Dan wisata lainnya juga yang ada di Desa Bulue yaitu Air Terjun Mina Awoe yang belum dikelola dengan baik. Hal ini sudah semestinya menjadi perhatian yang serius dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Soppeng.

Sementara Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan berada di ketinggian 1000 MDPL. Sehingga memiliki panorama alam yang indah, udara yang sejuk dan asri. Terdapat hutan pinus yang dijadikan objek wisata bernama LEMBAH CINTA yang memiliki cerita romantis dari awal pembuatannya. Adapun wahana yang tersedia antara lain fasilitas outbound, Camp area, zona kopi lokal khas Desa Mattabulu, pengolahan gula aren, spot selfi dan tersedia Hamook dan aula pertemuan. Selain wisata alam, juga terdapat air terjun yang dinamakan objek wisata LIU PANGIE. Liu Pangie memiliki wahana River tubing, spot foto dan area camp, panggung pertunjukan. Desa Mattabulu mempunyai koleksi flora: pohon aren, pangie dan pinus sedangkan fauna hewan endemika monyet tanpa ekor dan juga terdapat wisata budaya situs Petta Bulu Matanre, situs Petta Awo, situs Petta Abbanuange juga memiliki kesenian tradisional yaitu mappadendang dan musik gambus.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2023 dan mengambil fokus di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Desa Bulue dan Desa Mattabulu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini memilih 4 informan melalui purposive sampling yang mengasumsikan informan yang diambil

memiliki informasi yang dibutuhkan untuk penelitian yang dilakukan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis yang dapat dilakukan yaitu reduksi data (penyaringan/pemilahaan data), display data (penyajian data), verifikasi data (pengujian keabsahan/kebenaran data).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan desa wisata. Peran tersebut diwujudkan melalui identifikasi potensi wisata desa, pendampingan pengelolaan desa wisata, koordinasi dengan pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta masyarakat setempat. Upaya ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata tidak hanya bertumpu pada potensi alam, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam membangun sinergi antar pemangku kepentingan.

Dalam perspektif pembangunan pariwisata, pemerintah memiliki fungsi sebagai regulator, fasilitator, dan motivator. Sebagai regulator, pemerintah menetapkan arah pengembangan desa wisata melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan. Sebagai fasilitator, pemerintah memberikan pendampingan dan dukungan terhadap pengelolaan desa wisata. Sementara sebagai motivator, pemerintah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan potensi wisata yang dimiliki desa.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pembangunan desa wisata masih belum optimal. Beberapa desa wisata masih menghadapi keterbatasan dukungan berupa pelatihan, bantuan teknis, dan pendampingan yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan pengembangan potensi wisata di beberapa desa belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu,

diperlukan peningkatan intensitas pembinaan dan pendampingan agar desa wisata mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Penguatan Kelembagaan Desa Wisata

Kelembagaan merupakan unsur penting dalam pengembangan desa wisata karena berfungsi sebagai wadah koordinasi, pengelolaan, dan pengembangan berbagai potensi wisata yang dimiliki desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan desa wisata di Kabupaten Soppeng telah terbentuk melalui keberadaan BUMDes dan Pokdarwis yang bertugas mengelola aktivitas kepariwisataan di tingkat desa.

Keberadaan Pokdarwis memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pariwisata serta mewujudkan prinsip Sapta Pesona di kawasan wisata. Di sisi lain, BUMDes berperan dalam mengelola aspek usaha dan ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas wisata desa. Sinergi antara kedua lembaga tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan desa wisata.

Namun demikian, efektivitas kelembagaan masih dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, dan dukungan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan manajemen wisata, pengelolaan usaha, dan pemasaran destinasi menjadi kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan desa wisata.

Pengembangan Objek dan Daya Tarik Desa Wisata

Pengembangan objek wisata menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan desa wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Mattabulu memiliki berbagai potensi wisata yang terdiri atas wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Potensi tersebut antara lain Lembah Cinta, Air Terjun Liu Pangie, Flying Fox, Sepeda

Melayang, River Tubing, Mappadendang, pengolahan gula aren, serta kopi lokal Mattabulu. Selain itu, desa ini juga didukung oleh berbagai fasilitas penunjang seperti area parkir, kafetaria, musholla, kios souvenir, area swafoto, dan fasilitas outbound.

Keberagaman atraksi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata tidak hanya berfokus pada objek wisata semata, tetapi juga mengintegrasikan unsur budaya, ekonomi kreatif, dan kehidupan masyarakat lokal. Konsep ini sejalan dengan prinsip pengembangan desa wisata yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat pembangunan pariwisata.

Namun, kondisi yang berbeda terlihat pada Desa Bulue yang masih berada pada tahap pengembangan awal. Meskipun memiliki potensi wisata yang menjanjikan, pengelolannya belum optimal akibat keterbatasan anggaran dan belum tersedianya dukungan pengembangan yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan perkembangan antar desa wisata yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah melalui kebijakan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Pemasaran Desa Wisata Berbasis Digital

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan strategi pemasaran pariwisata dari metode konvensional menuju pemasaran digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran desa wisata di Kabupaten Soppeng dilakukan melalui berbagai platform digital seperti website desa, Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Pemanfaatan media digital memberikan kemudahan dalam memperkenalkan destinasi wisata kepada masyarakat yang lebih luas dengan biaya yang relatif lebih efisien dibandingkan metode promosi konvensional.

Website desa berfungsi sebagai pusat informasi resmi yang menyediakan berbagai informasi mengenai destinasi wisata, fasilitas,

aktivitas wisata, dan potensi ekonomi desa. Sementara itu, media sosial dimanfaatkan sebagai sarana promosi yang interaktif melalui penyebaran foto, video, dan berbagai konten informatif mengenai desa wisata. Strategi ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pengelola wisata dan calon wisatawan.

Meskipun penggunaan media digital telah dilakukan, efektivitas pemasaran masih perlu ditingkatkan. Pengelolaan konten digital belum dilakukan secara profesional dan terintegrasi, sehingga daya jangkauan promosi masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pengelola desa wisata dalam bidang pemasaran digital, pengelolaan media sosial, dan pengembangan konten kreatif agar promosi desa wisata dapat lebih efektif dalam menarik kunjungan wisatawan.

KESIMPULAN

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Soppeng dari sebagai mana peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Desa Wisata dari aspek pembangunan desa wisata terdiri dari Kelembagaan Desa Wisata, Objek Desa Wisata, Pemasaran Desa Wisata, telah berjalan dengan baik. Dari aspek Kelembagaan Desa Wisata di desa mattabulu dan bulue sudah terbentuk lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Pokdarwis yang mengelola desa wisata, sementara objek desa wisata masing-masing desa memiliki daya tarik tersendiri baik objek wisata alam maupun objek wisata budaya, sedangkan pemasaran desa wisata dilakukan oleh seluruh stakeholder baik pemerintah kabupaten yang melakukan promosi dalam bentuk iklan maupun promosi langsung dalam bentuk pengenalan objek wisata yang ada di Kabupaten Soppeng serta pemerintah desa melakukan promosi melalui akun Website resmi maupun media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter masing-masing desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Kurnia Ali, Faried, 2015. Teori dan Konsep Administrasi. Jakarta, PT Rajawali Pers
- Anuar, Ahmad Nazrin Aris., Ahmad, Habibah., Jusoh, Hamzah., and Hussain, Mohd Yusof. 2012. The Roles of Tourism System towards Development of Tourist Friendly Destination Concept. *Asian Social Science*, 8(6), pp:146-155.
- Azwar, S. (1999). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bekti, Bintu Humairah. 2015. Mahir Membuat Website dengan Adobe Dreamweaver CS6, CSS dan JQuery. Yogyakarta: ANDI
- Binns, T., Nel. & Etienne. 2002. Tourism as a Local Development Strategy in South Africa. *The Geographical Journal*, 168(3). 235-247
- Budiardjo, M. (2003). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia pustaka utama.
- Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., & Wanhill, S. (1996). *Tourism Principle & Practice*. London: Longman Group Limited.
- Detik.com diakses pada hari senin tanggal 1 Agustus 2022
- Dwyer, L. and Spurr, R. 2009. *Tourism Economics Summary*. STCRC Centre for Economic and Policy
- Fadli, Koziar Barbara. *Pengertian Peran*. Bandung: Pustaka Intermedia. 2008
- Iskandar Wiryokusumo dalam Afrilianasari, 2014. *Teori Pengembangan*, Surabaya
- J. Muljadi dan Andri Warman. 2014. *Kepariwisata dan Perjalanan*, Depok: Rajagrafindo Persada
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010
- Karim, S., dan Kusuma, BJ. 2015. Pengaruh Psikografi Kunjungan Pasar Wisman Terhadap Pengembangan Produk Wisata di Sulawesi Selatan. *Politeknik Negeri Balikpapan*
- Kurnia Ari, Strategi Pemasaran Digital Sebagai Destinasi Desa Wisata; Pemanfaatan Pemasaran berbasis Digital sebagai Upaya Pemasaran Desa Wisata di Indonesia. Universitas Bakrie Press. Kuningan Jakarta DKI Jakarta Jakarta Selatan
- Lie, Liana. 2004. Penggunaan Metode Regresi-Korelasi Untuk Peramalan Kunjungan Wisata. *Jurnal Ilmiah Dinamika Kepariwisata*, 2(1), 1-12
- Miftah Thoha. 2012. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Peraturan Daerah Soppeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Desa Wisata
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025
- Pitana, I gede dan Putu G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta. CV Andi Offset
- Pitana, I.G, dan Diarta I.K. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Putra, Theofilus Retmana. 2013. Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Atraksi Wisata di Desa Wisata Tembi, Kecamatan Sewon-Kabupaten Bantul. *Jurnal Pengembangan Wilayah dan Kota*. Vol. 9, No. 3.
- Putri, Rebecca Christina. 2014. Analisis Daya Saing Industri Pariwisata Di Kabupaten Jepara Untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah. [skripsi]. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Tjahjadi Michael dkk, (2016). *Kesiapan Sektor Pariwisata*. Surabaya
- Yuliati, E., & Suwandono, D. (2016). *Arahan Konsep dan Strategi Pengembangan Kawasan Desa Wisata Nongkosawit Sebagai Destinasi Wisata Kota Semarang*. Arahan Konsep Dan Strategi Pengembangan Kawasan Desa Wisata

Nongkosawit Sebagai Destinasi Wisata
Kota Semarang, 2(4), 263–272.
[https://doi.org/10.14710/ruang.2.4.263-
272](https://doi.org/10.14710/ruang.2.4.263-272)

Yusuf A Hilman dkk, (2018). Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pengembangan
Pariwisata. Karangasem